

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Banda Aceh;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota

- Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam; dan
- 3) Level 3 (tiga) Kabupaten Pidie,
- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kabupaten Toba, Nias Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara, Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Kota Tanjung Balai, Kota Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Pariaman;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Padang Panjang,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai,

- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Jambi; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kota Sungai Penuh,
- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Pagar Alam; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Palembang,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang; dan
- 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas,
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Dompu,
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Kupang;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Sumba Timur,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Landak,
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kubu Raya; dan

- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Murung Raya; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Balangan;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kota Banjarbaru; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Banjarmasin,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Balikpapan;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, dan Kota Bontang; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu,
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan;
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Minahasa Selatan;

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Utara, Bolaang Mongondow Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu; dan
- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Morowali:
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Luwu Timur;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten

- Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Baubau; dan
- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari,
- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bone Bolango; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo;
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Tidore Kepulauan; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate,
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Waropen Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Yalimo;
 - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Jayapura,
 Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor,
 Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai,

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai; dan

- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kota Jayapura,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.

KEDUA

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada **KESATU** berpedoman Diktum pada Indikator Penyesuaian Kesehatan Masyarakat Upaya dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) kurang dari 45% (empat puluh lima persen) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu) kurang dari 60% (enam puluh persen).

KETIGA

- PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan

- Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan bahan Terpadu (Posyandu), pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pasar modal, logistik, perhotelan, pembayaran, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- tradisional, pedagang kaki e. pasar lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan

- 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;
 - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
- pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal puluh persen), (lima dengan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olaharaga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan

- penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran terbatas jarak berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/202, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19):
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang

KEEMPAT

dilakukan dengan:

- 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
- 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
- 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan bahan pangan, Terpadu (Posyandu), makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi perbankan, informasi, keuangan, sistem pasar modal, logistik, perhotelan, pembayaran, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- tradisional, pasar pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan memakai masker, mencuci handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dan kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan taksi (konvensional masal, dan online) kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

: PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan

KELIMA

- 4) pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;

- 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
- 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan di tempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen), dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan 100% maksimal (seratus persen) dengan aplikasi PeduliLindungi menggunakan atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah:
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;

- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face* shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung, dan penonton wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan c. diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan maksimal persentase dari kapasitas stadion mengikuti kriteria level di Kabupaten/Kota sebagai berikut: 50% (lima puluh persen) untuk level 3 (tiga), 75% (tujuh puluh lima persen) untuk level 2 (dua) dan 100% (seratus persen) untuk level 1 (satu);
 - d. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung, dan penonton yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi

KEENAM

KETUJUH

Utara, Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bandar Udara Kualanamu di Provinsi Sumatera Utara, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. pintu masuk laut hanya melalui Tanjung Benoa di Provinsi Bali, Batam, Tanjung Pinang, dan Lagoi Bintan, Tanjung Balai Karimun, Dumai di Provinsi Kepulauan Riau, dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara dan untuk Tanjung Benoa, Batam, Tanjung Pinang, dan Lagoi dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*);
- c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- d. layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal Warga Negara Asing (WNA) atau Awak Kapal Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kapal Berbendera Asing dapat dilakukan di pelabuhan berikut yakni Belawan, Tanjung Balai Karimun (Pulau Nipah dan Tg. Balai Karimun), Batam (Pulau Galang, Batu Ampar, dan Kabil), Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Benoa, Sorong, Ambon, dan Bitung;
- e. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait.

KEDELAPAN

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KESEMBILAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan

KESEPULUH

: Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KESEBELAS

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

- c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

| Positivity rate | Jumlah tes (per 1000 | |
|-----------------|----------------------|--|
| Mingguan | penduduk per minggu) | |
| <5% | 1 | |
| >5%-<15% | 5 | |
| >15%-<25% | 10 | |
| >25% | 15 | |

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

| No | Provinsi | Kabupaten/Kota | Target Jumlah Orang Dites/ Hari |
|-----|----------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Aceh | Kabupaten Aceh Selatan | 178 |
| 2. | | Kabupaten Aceh Tenggara | 159 |
| 3. | | Kabupaten Aceh Timur | 320 |
| 4. | | Kabupaten Aceh Tengah | 156 |
| 5. | | Kabupaten Aceh Barat | 154 |
| 6. | | Kabupaten Aceh Besar | 312 |
| 7. | | Kabupaten Pidie | 327 |
| 8. | | Kabupaten Aceh Utara | 455 |
| 9. | | Kabupaten Simeulue | 70 |
| 10. | | Kabupaten Aceh Singkil | 91 |
| 11. | | Kabupaten Bireuen | 346 |
| 12. | | Kabupaten Aceh Barat Daya | 111 |
| 13. | | Kabupaten Gayo Lues | 69 |
| 14. | | Kabupaten Aceh Jaya | 70 |
| 15. | | Kabupaten Nagan | 122 |

| | | Raya | |
|------------|----------|---------------------------|------|
| 16. | | Kabupaten Aceh | |
| | | Tamiang | 217 |
| 17. | | Kabupaten Bener | 400 |
| | | Meriah | 109 |
| 18. | | Kabupaten Pidie | 110 |
| | | Jaya | 118 |
| 19. | | Kota Banda Aceh | 40 |
| 20. | | Kota Sabang | 5 |
| 21. | | Kota Lhokseumawe | 152 |
| 22. | | Kota Langsa | 131 |
| 23. | | Kota | 59 |
| | | Subulussalam | 33 |
| 24. | Sumatera | Kabupaten | 288 |
| | Utara | Tapanuli Tengah | 200 |
| 25. | | Kabupaten | 44 |
| 26 | | Tapanuli Utara | |
| 26. | | Kabupaten | 204 |
| 07 | | Tapanuli Selatan | 404 |
| 27. | - | Kabupaten Nias | 104 |
| 28. | | Kabupaten | 757 |
| 20 | - | Langkat | |
| 29. 30. | - | Kabupaten Karo | 63 |
| 30. | | Kabupaten Deli Serdang | 338 |
| 31. | 1 | Kabupaten | |
| 31. | | Simalungun | 125 |
| 32. | | Kabupaten Asahan | 534 |
| 33. | | Kabupaten Kabupaten | 334 |
| 55. | | Labuhanbatu | 376 |
| 34. | - | Kabupaten Dairi | 41 |
| 35. | - | Kabupaten Toba | |
| 00. | | Samosir | 26 |
| 36. | • | Kabupaten | |
| | | Mandailing Natal | 66 |
| 37. | | Kabupaten Nias | 4-7 |
| | | Selatan | 47 |
| 38. | 1 | Kabupaten Pakpak | 0 |
| | | Bharat | 8 |
| 39. | | Kabupaten | |
| | | Humbang | 140 |
| | | Hasundutan | |
| 40. | | Kabupaten | 18 |
| | | Samosir | 10 |
| 41. | | Kabupaten | 88 |
| 1.0 | | Serdang Bedagai | - 55 |
| 42. | | Kabupaten Batu | 307 |
| 40 | | Bara | |
| 43. | | Kabupaten Padang | 209 |
| 4.4 | - | Lawas Utara | |
| 44. | | Kabupaten Padang | 218 |
| 45. | - | Lawas | |
| 45. | | Kabupaten | 261 |
| | | Labuhanbatu Selatan | 201 |
| 46. | - | Kabupaten | |
| TU. | | Labuhanbatu | 267 |
| | | Utara | 201 |
| 47. | 1 | Kabupaten Nias | |
| ''' | | Utara | 20 |
| 48. | 1 | Kabupaten Nias | |
| | | Barat | 12 |
| 49. | 1 | Kota Medan | 333 |
| 50. | 1 | Kota | 37 |
| | | • | |

| | | T | |
|------------|----------|------------------------|--------------|
| | | Pematangsiantar | |
| 51. | | Kota Sibolga | 13 |
| 52. | | Kota Tanjung Balai | 26 |
| 53. | | Kota Binjai | 41 |
| 54. | | Kota Tebing Tinggi | 24 |
| 55. | | Kota Padang | 167 |
| | | Sidempuan | 107 |
| 56. | | Kota Gunungsitoli | 21 |
| 57. | Sumatera | Kabupaten Pesisir | 0.40 |
| | Barat | Selatan | 340 |
| 58. | | Kabupaten Solok | 273 |
| 59. | | Kabupaten | |
| 55. | | Sijunjung | 180 |
| 60. | | Kabupaten Tanah | |
| 00. | | Datar | 50 |
| <i>C</i> 1 | | | |
| 61. | | Kabupaten Padang | 303 |
| | | Pariaman | - |
| 62. | | Kabupaten Agam | 72 |
| 63. | | Kabupaten Lima | 282 |
| | | Puluh Kota | 202 |
| 64. | | Kabupaten | 208 |
| | | Pasaman | 200 |
| 65. | | Kabupaten | |
| | | Kepulauan | 71 |
| | | Mentawai | |
| 66. | | Kabupaten | |
| | | Dharmasraya | 195 |
| 67. | | Kabupaten Solok | + |
| 07. | | Selatan | 130 |
| 68. | | | |
| 00. | | Kabupaten | 341 |
| | | Pasaman Barat | 1.10 |
| 69. | | Kota Padang | 142 |
| 70. | | Kota Solok | 11 |
| 71. | | Kota Sawahlunto | 9 |
| 72. | | Kota Padang | 8 |
| | | Panjang | |
| 73. | | Kota Bukittinggi | 20 |
| 74. | | Kota Payakumbuh | 20 |
| 75. | | Kota Pariaman | 13 |
| 76. | Riau | Kabupaten Kampar | 128 |
| 77. | | Kabupaten | |
| | | Indragiri Hulu | 320 |
| 78. | | Kabupaten | |
| . 5. | | Bengkalis | 82 |
| 79. | | Kabupaten | + |
| 19. | | Indragiri Hilir | 517 |
| 80 | | | + |
| 80. | | Kabupaten Pelalawan | 385 |
| 01 | | | + |
| 81. | | Kabupaten Rokan | 534 |
| 00 | | Hulu | + |
| 82. | | Kabupaten Rokan | 529 |
| | | Hilir | |
| 83. | | Kabupaten Siak | 73 |
| 84. | | Kabupaten | 46 |
| | | Kuantan Singingi | 70 |
| 85. | | Kabupaten | 27 |
| | | Kepulauan Meranti | |
| 86. | | Kota Pekanbaru | 168 |
| 87. | | Kota Dumai | 45 |
| 88. | Jambi | Kabupaten Kerinci | 172 |
| 89. | | Kabupaten | |
| 0). | | Merangin | 281 |
| | | Kabupaten | 1 |
| un | | | |
| 90. | | Sarolangun | 222 |

| 92. Kabupaten Batanghari 195 | | 1 | | |
|--|-------|----------|-----------------|------|
| 92. | 91. | | Kabupaten | 195 |
| Sample S | | | | 100 |
| 93. | 92. | | - | 331 |
| Second S | | | | 331 |
| Sarat | 93. | | Kabupaten | |
| 94. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sabupaten Bungo 276 Kabupaten Tebo 258 Kota Jambi 87 Kota Sungai Penuh 63 Kabupaten Ogan Kabupaten Musi Rawas 300 Mayawas 300 | | | Tanjung Jabung | 243 |
| Tanjung Jabung Timur | | | Barat | |
| Timur | 94. | | Kabupaten | |
| Timur | | | | 153 |
| 96. 97. 88. 84. 84. 87. 88. 89. 89. 89. 80. | | | | |
| 96. 97. 88. 84. 84. 87. 88. 89. 89. 89. 80. | 95. | | Kabupaten Bungo | 276 |
| 97. | | 1 | | 258 |
| 98. Sumatera Selatan Kota Sungai Penuh 63 100. Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu 273 101. Kabupaten Ogan Komering Ilir 616 102. Kabupaten Muara Eniim 95 103. Kabupaten Lahat 60 104. Kabupaten Musi Banyuasin 482 105. Kabupaten Musi Banyuasin 482 106. Kabupaten Ogan Komering Ulu Mapruasin 497 107. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 269 108. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 317 109. Kabupaten Dgan Komering Ulu Selatan 185 110. Kabupaten Empat Lawang 185 110. Kabupaten Musi Rabupaten Musi Rawas Utara 142 111. Kabupaten Musi Rawas Utara 142 112. Kota Palembang 248 Kota Palambang 248 Kota Pa | | | | - |
| 99. Sumatera Selatan | | 1 | | |
| Selatan Komering Ulu | | Sumatera | | |
| 100. Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara 95 | , , , | | | 273 |
| Nomering Ilir National State Natio | 100 | Solution | | |
| 101. | 100. | | | 616 |
| Enim 95 | 101 | - | | |
| 102. | 101. | | | 95 |
| 103. Kabupaten Musi Rawas 300 | 102 | 1 | | 60 |
| Rawas Sanyuasin A82 | | 1 | | |
| 104. Kabupaten Musi Banyuasin | 103. | | | 300 |
| Banyuasin | 104 | 1 | | |
| 105. Kabupaten Banyuasin 635 106. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 107. 107. Kabupaten Ogan Komering Ulu 269 Selatan 118. 108. Kabupaten Ogan Kabupaten Ogan Ilir 111. 109. Kabupaten Empat Lawang 185 110. Kabupaten Empat Lawang 141 111. Kabupaten Musi Rawas Utara 142 112. Kabupaten Musi Rawas Utara 102 113. Kota Palembang 248 Kota Pagar Alam 102 114. Kota Lubuklinggau 35 116. Bengkulu Kabupaten 26 117. Kabupaten Rejang 40 118. Kabupaten Rejang 40 118. Kabupaten Rejang 40 120. Kabupaten Raur 89 Kabupaten Rejang 121 120. Kabupaten Kaur 89 Kabupaten Rejang 143 121. Kabupaten Muko 136 Kabupaten Rejang 143 122. Kabupaten Lebong 84 Kabupaten Raur 143 123. Kabupaten Lebong 84 Kabupaten Rejang 102 124. Kabupaten Raur 89 Kabupaten Raur 89 125. Kabupaten Raur 89 Kabupaten Raur 89 126. Lampung Kabupaten 102 124 127. Kabupaten Raur 102 124 128. Kabupaten Raur 102 126 129. Kabupaten Raur 102 126 120. Kabupaten Raur 127 128 121. Kabupaten Raur 128 128 122. Kabupaten Raur 128 128 123. Kabupaten Raur 128 128 124. Rabupaten Raur 128 128 125. Kabupaten Raur 128 128 126. Lampung Kabupaten 148 127. Lampung Kabupaten 148 128. Lampung Kabupaten 148 129. Lampung Kabupaten 148 120. Lampung Kabupaten 148 121. Lampung Kabupaten 148 126. Lampung Kabupaten 148 127. Lampung Kabupaten 148 128. Lampung Kabupaten 148 129. Lampung Kabupaten 148 120. Lampung Kabupaten 148 121. Lampung Kabupaten 148 122. Lampung Kabupaten 148 123. Lampung Kabupaten 148 124. Lampung Kabupaten | 104. | | | 482 |
| Banyuasin 635 | 105 | - | | |
| 106. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 105. | | | 635 |
| Komering Ulu Timur Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu 269 Selatan 317 | 100 | | | |
| Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sela | 106. | | | 407 |
| 107. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | | | | 497 |
| Komering Ulu Selatan | | | | |
| Selatan Kabupaten Ogan Ilir | 107. | | | |
| Kabupaten Ogan 11 | | | | 269 |
| Ilir | | | | |
| Ilir | 108. | | | 317 |
| Lawang | | | | 017 |
| Lawang | 109. | | Kabupaten Empat | 185 |
| Penukal Abab Lematang Ilir | | | Lawang | 100 |
| Lematang Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara 142 | 110. | | | |
| Table | | | Penukal Abab | 141 |
| Rawas Utara 142 | | | Lematang Ilir | |
| Rawas Utara Kota Palembang 248 | 111. | | Kabupaten Musi | 1.10 |
| 113. Kota Pagar Alam 102 | | | Rawas Utara | 142 |
| 113. | 112. | | Kota Palembang | 248 |
| Kota Lubuklinggau 35 | 113. | | | 102 |
| 115. Kota Prabumulih 28 | |] | | |
| 116. Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan 26 117. Kabupaten Rejang Lebong 40 118. Kabupaten Rejang Lebong 221 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Kaur Seluma 143 121. Kabupaten Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148 | | 1 | | |
| Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong 40 | | Bengkulu | | |
| 117. Kabupaten Rejang Lebong 40 118. Kabupaten Bengkulu Utara 221 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 Kabupaten Seluma 143 Kabupaten Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten | | 3 | | 26 |
| Lebong 40 118. Kabupaten Bengkulu Utara 221 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 Kabupaten Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148 | 117. | 1 | | |
| 118. Kabupaten Bengkulu Utara 221 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148 | | | | 40 |
| Bengkulu Utara Kabupaten Kaur 89 | 118 | 1 | | |
| 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten | 110. | | | 221 |
| 120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148 | 110 | 1 | | 80 |
| 121. Kabupaten Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Lebong 102 Kabupaten Kepahiang 102 Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148 | | 1 | | |
| Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten | | 1 | | |
| 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102 Kepahiang Kabupaten 83 124. Bengkulu Tengah 54 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148 | 141. | | | 136 |
| 123. Kabupaten Kepahiang 102 124. Kabupaten Bengkulu Tengah 83 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148 | 100 | 1 | | QΛ |
| Kepahiang 124. Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148 | | 1 | | 04 |
| 124.Kabupaten Bengkulu Tengah83125.Kota Bengkulu54126.LampungKabupaten | 143. | | | 102 |
| Bengkulu Tengah 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten | 104 | - | | |
| 125. Kota Bengkulu 54 126. Lampung Kabupaten 148 | 124. | | | 83 |
| 126. Lampung Kabupaten | 105 | - | | |
| | | T | | 54 |
| Lampung Selatan | 126. | Lampung | | 148 |
| | | | Lampung Selatan | |

| 127. | | 1 | | |
|--|------|-----------|-----------------------------|-----|
| Lampung Utara Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Tanggamus Kabupaten Kabupaten Manual Ma | 127. | | Kabupaten Lampung Tengah | 936 |
| 129. | 128. | | _ | 445 |
| 130. Kabupaten Tulang Bawang Rabupaten Tanggamus A40 132. Kabupaten | 129. | | Kabupaten | 442 |
| 131. | 130. | | Kabupaten Tulang | 333 |
| 132. | 131. | | Kabupaten | 440 |
| Lampung limur Kabupaten Way Kanan | 132. | | Kabupaten | 763 |
| 134. | 133. | | | |
| Pesawaran Rabupaten Pringsewu 292 | 134. | | | |
| Pringsewu 292 | | | Pesawaran | |
| 137. | | | Pringsewu | |
| Bawang Barat | | | | 145 |
| Barat Stota Bandar Lampung Stota Bandar Lampung Stota Bandar Lampung Stota Metro S | | | Bawang Barat | 199 |
| Lampung | | | Barat | 113 |
| 140. | 139. | | | 158 |
| 141. Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung 49 142. Bangka Belitung Kabupaten Bangka Selatan 152 144. Kabupaten Bangka Selatan 142 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Bangka Barat 31 147. Kota Belitung Timur 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Riau Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Bintan 24 150. Kabupaten Natuna 58 151. Kabupaten Natuna 58 Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan Repulauan Rep | 140. | 1 | | 25 |
| 142. Bangka Belitung Kabupaten Belitung 27 143. Kabupaten Bangka Selatan 152 144. Kabupaten Bangka Tengah 142 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Bangka Barat 31 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Riau Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Bintan 24 Kabupaten Karimun 34 Kabupaten Natuna 58 Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan 6 152. Kabupaten Kepulauan 6 Anambas 153. Kota Batam 230 Kota Tanjung Pinang 32 154. Kota Batam 230 Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106 Kabupaten Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 | | Kenulauan | <u> </u> | |
| 143. Kabupaten Bangka Selatan 152 144. Kabupaten Bangka Tengah 142 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Bangka Barat 31 147. Kabupaten Belitung Timur 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Bintan 24 150. Kabupaten Natuna 58 151. Kabupaten Natuna 58 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Kepulauan Anambas 6 153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Tenggara Kabupaten Lombok Barat 106 156. Barat Kabupaten Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 | | Bangka | Kabupaten | |
| 144. Kabupaten Bangka Tengah 142 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung Timur 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Riau Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Bintan 24 Kabupaten Riau Kabupaten Bangka Barat 31 150. Kabupaten Bangka Barat 34 Kabupaten Bangka Barat 34 Kabupaten Bangka Barat 34 Kabupaten Natuna Sa Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kapupaten Kapupaten Kapupaten Bangka Barat 230 Kota Batam Sa Kabupaten Lombok Barat Barat 106 155. Nusa Kabupaten Lombok Barat Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 158. Kabupaten Dompu 38 | 143. | Dentang | Kabupaten Bangka | 152 |
| 145. Kabupaten Bangka Barat 31 146. Kabupaten Belitung Timur 19 147. Kota Pangkalpinang 31 148. Kepulauan Riau Kabupaten Bintan 24 149. Kabupaten Bintan 24 Kabupaten Bintan 34 Kabupaten Bintan 34 Kabupaten Natuna 58 Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan Ganambas 6 153. Kota Batam 230 Kota Tanjung Pinang 32 Nusa Tenggara Kabupaten Lombok Barat 106 156. Barat Kabupaten Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 Kabupaten Sumbawa 69 Kabupaten Dompu 38 | 144. | | Kabupaten Bangka | 142 |
| 146. Barat 147. Kabupaten 147. Rota 148. Kepulauan 149. Kabupaten Bintan 149. Kabupaten Bintan 150. Kabupaten Natuna 151. Kabupaten Natuna 152. Kabupaten Lingga 153. Kabupaten 154. Kota Batam 230 Kota Tanjung 32 Pinang 32 155. Nusa Kabupaten 156. Barat Kabupaten 157. Kabupaten 142 Kabupaten 179 Kabupaten 179 Kabupaten 179 Kabupaten 179 Kabupaten 179 Kabupaten 69 Kabupaten Dompu 38 | 145. | | Kabupaten Bangka | 31 |
| 147. Kota Pangkalpinang 31 | 146. | | Kabupaten | |
| 148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24 149. Riau | 147. | | | |
| 149. Riau Kabupaten Karimun 34 150. Kabupaten Natuna 58 151. Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan Kepulauan Anambas 6 153. Kota Batam 230 Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa Tenggara Lombok Barat 106 156. Barat Kabupaten Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 | | | Pangkalpinang | 31 |
| Karimun S4 | 148. | Kepulauan | Kabupaten Bintan | 24 |
| 150. Kabupaten Natuna 58 Kabupaten Lingga 13 152. Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan 6 Anambas 153. Kota Batam 230 Kota Tanjung 32 Pinang 32 155. Nusa Tenggara Lombok Barat 106 Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 159 150 | 149. | - | Kabupaten | 34 |
| Kabupaten Lingga 13 Kabupaten Kepulauan 6 Anambas | 150. | | | 58 |
| 152. Kabupaten Kepulauan Anambas 6 153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung Pinang 32 155. Nusa | | 1 | | |
| 153. Kota Batam 230 154. Kota Tanjung 32 155. Nusa Kabupaten 106 156. Barat Kabupaten 142 157. Kabupaten 179 158. Kabupaten 69 159. Kabupaten Dompu 38 | | | Kabupaten Kepulauan | |
| 154. Kota Tanjung 32 155. Nusa Kabupaten 106 156. Barat Kabupaten 142 157. Kabupaten 179 158. Kabupaten 69 159. Kabupaten Dompu 38 | 153 | 1 | | 230 |
| 155. Nusa Kabupaten 106 156. Barat Kabupaten 142 157. Kabupaten 179 158. Kabupaten 69 159. Kabupaten Dompu 38 | | - | Kota Tanjung | |
| 156. Barat Kabupaten Lombok Tengah 142 157. Kabupaten Lombok Timur 179 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 | 155. | | Kabupaten | 106 |
| Kabupaten Lombok Timur179158.Kabupaten Sumbawa69159.Kabupaten Dompu38 | 156. | | Kabupaten | 142 |
| 158. Kabupaten Sumbawa 69 159. Kabupaten Dompu 38 | 157. | | Kabupaten | 179 |
| Sumbawa 159. Kabupaten Dompu 38 | 158. | | Kabupaten | |
| | 150 | - | | |
| 160. Kabupaten Bima 74 | | - | | |
| 4.64 | | - | | 74 |
| Kabupaten Sumbawa Barat 24 | | | Sumbawa Barat | 24 |
| Kabupaten Lombok Utara 33 | 162. | | | 33 |

| 164. | 160 | | TZ-4- M-4 | 75 |
|--|------|------------|-----------------|------|
| 165. | 163. | | Kota Mataram | 75 |
| 166. Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan 68 167. Kabupaten Timor Tengah Utara 37 168. Kabupaten Belu 33 169. Kabupaten Belu 30 170. Kabupaten Hores 37 171. Kabupaten Flores 37 171. Kabupaten Sikka 46 172. Kabupaten Sikka 46 Kabupaten Belu 33 37 171. Kabupaten Sikka 46 Kabupaten Belu 39 37 171. Kabupaten Belu 39 Kabupaten Belu 38 46 Kabupaten Belu 38 46 Kabupaten Belu 38 42 Kabupaten Belu 38 42 Kabupaten Sumba 191 191 176. Kabupaten Sumba 138 177. Kabupaten Sumba 138 180. Kabupaten Sumba 54 181. Kabupaten Sumba 52 182. <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td></td> | | NT | | |
| Timur | | | | 58 |
| 167. | 100. | | | 68 |
| Tengah Utara Si | 167 | IIIIui | Volumeten Timor | |
| 168. Kabupaten Belu 33 Kabupaten Alor 30 170. Kabupaten Flores 37 171. Kabupaten Sikka 46 172. Kabupaten Ende 39 173. Kabupaten Ngada 24 174. Kabupaten Sumba 50 175. Kabupaten Sumba 191 176. Kabupaten Sumba 191 177. Kabupaten Sumba 191 178. Kabupaten Rote 138 179. Kabupaten Rote 138 179. Kabupaten Barat 42 180. Kabupaten Sumba 54 181. Kabupaten Sumba 54 182. Kabupaten Sumba 54 183. Kabupaten Sumba 54 184. Kabupaten Sumba 52 183. Kabupaten Sumba 52 184. Kabupaten Sumba 52 185. Kabupaten Sahu 75 186. Kabupaten Malaka 29 187. Kalimantan Kabupaten 78 188. Kabupaten 39 189. Kabupaten 39 189. Kabupaten 69 190. Kabupaten Kapuas 61 Kabupaten Kapupaten Kapuas 196 Kabupaten Kapupas 196 | 107. | | | 37 |
| Kabupaten Alor 30 | 160 | | | 22 |
| 170. Kabupaten Flores 37 171. 172. Kabupaten Sikka 46 172. Kabupaten Ende 39 173. Kabupaten Ngada 24 Kabupaten Sumba 50 Kabupaten Sumba 191 176. Kabupaten Sumba 97 | | | | |
| Timur 37 | | | | 30 |
| 171. | 170. | | | 37 |
| 172. | 171 | | | 46 |
| 173. | | | | |
| 174. Kabupaten Manggarai 50 | | | _ | |
| Manggarai 50 | | | | 24 |
| 175. | 174. | | | 50 |
| Timur | 175 | | | |
| 176. Kabupaten Sumba Barat 108 178. Kabupaten Rote Ndao 138 179. Kabupaten Barat 42 180. Kabupaten Sumba Barat 42 180. Kabupaten Sumba Sabu Rabupaten Sumba Barat Daya 52 183. Kabupaten Sumba Barat Daya 52 184. Kabupaten Sabu Rajua 75 185. Kabupaten Malaka 29 186. Kabupaten Malaka 29 187. Kalimantan Barat Kabupaten Sabu Rajua 78 188. Kabupaten Barat 54 189. Kabupaten Malaka 29 180. Kabupaten Malaka 29 180. Kabupaten Malaka 29 180. Kabupaten Malaka 39 189. Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Kabupaten Kabupaten Sanggau 190. Kabupaten Sintang 61 Kabupaten Kabu | 173. | | | 191 |
| Barat Stabupaten Lembata 108 | 176 | | | |
| 177. | 170. | | | 97 |
| Lembata 108 | 177 | | | |
| 178. | 177. | | | 108 |
| Ndao | 178 | | | |
| 179. Kabupaten Manggarai Barat 42 180. Kabupaten Nagekeo 21 181. Kabupaten Sumba 54 182. Kabupaten Sumba Barat Daya 52 183. Kabupaten Sabu Manggarai Timur 42 184. Kabupaten Sabu 75 185. Kabupaten Malaka 29 186. Kabupaten Malaka 29 187. Kalimantan Kabupaten 78 188. Kabupaten 39 189. Kabupaten 69 190. Kabupaten 69 191. Kabupaten Sintang 61 189. Kabupaten 76 180. Kabupaten 76 180. | 170. | | | 138 |
| Manggarai Barat Kabupaten Nagekeo 21 | 179 | | | |
| 180. Kabupaten Nagekeo 21 181. Kabupaten Sumba Tengah 54 182. Kabupaten Sumba Barat Daya 52 183. Kabupaten Manggarai Timur 42 184. Kabupaten Sabu Raijua 75 185. Kabupaten Malaka 29 186. Kota Kupang 67 187. Kalimantan Barat Kabupaten 78 188. Kabupaten 39 189. Kabupaten 69 190. Kabupaten 69 Kabupaten Kabupa | 117. | | | 42 |
| Nagekeo 21 | 180 | | | |
| 181. Kabupaten Sumba Tengah 54 182. Kabupaten Sumba Barat Daya 52 183. Kabupaten Manggarai Timur 42 184. Kabupaten Sabu Raijua 75 185. Kabupaten Malaka 29 186. Kota Kupang 67 187. Kalimantan Barat Kabupaten Sambas 78 188. Kabupaten Sanggau 39 189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Sintang 76 191. Kabupaten Kapuas Hulu 196 | 100. | | | 21 |
| 182. Tengah 54 183. Kabupaten Sumba Barat Daya 52 183. Kabupaten Manggarai Timur 42 184. Kabupaten Sabu Raijua 75 185. Kabupaten Malaka 29 186. Kota Kupang 67 187. Kalimantan Barat Kabupaten 78 188. Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Kabupaten Ketapang 76 191. Kabupaten Sintang 61 192. Kabupaten Kapuas Hulu 196 | 181 | | | |
| 182. Kabupaten Sumba Barat Daya 52 183. Kabupaten Manggarai Timur 42 184. Kabupaten Sabu Raijua 75 185. Kabupaten Malaka 29 186. Kota Kupang 67 187. Kalimantan Barat Kabupaten 78 188. Kabupaten 39 189. Kabupaten 69 190. Kabupaten 69 191. Kabupaten Sintang 61 Kabupaten Kapuas Hulu 196 | 101. | | | 54 |
| Barat Daya S2 | 182. | | | |
| 183. Kabupaten Manggarai Timur 42 184. Kabupaten Sabu Raijua 75 185. Kabupaten Malaka 29 186. Kota Kupang 67 187. Kalimantan Barat Kabupaten 78 188. Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu 76 191. Kabupaten Kapuas Hulu 196 | 101. | | | 52 |
| Manggarai Timur Kabupaten Sabu Raijua 75 | 183. | | | 10 |
| 184. Kabupaten Sabu Raijua 75 185. Kabupaten Malaka 29 186. Kota Kupang 67 187. Kalimantan Barat Kabupaten Sambas 78 188. Kabupaten Sambas 39 189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Sanggau 76 191. Kabupaten Sintang 61 192. Kabupaten Kapuas Hulu 196 | 100. | | | 42 |
| Raijua | 184. | | | |
| 185. Kabupaten Malaka 29 186. Kota Kupang 67 187. Kalimantan Barat Kabupaten 78 188. Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Kabupaten Ketapang 76 191. Kabupaten Sintang 61 192. Kabupaten Kapuas Hulu 196 | | | 1 | /5 |
| 186. Kota Kupang 67 187. Kalimantan Barat Kabupaten Sambas 78 188. Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Kabupaten Ketapang 76 191. Kabupaten Sintang 61 192. Kabupaten Kapuas Hulu 196 | 185. | | | 29 |
| 187. Kalimantan Barat Kabupaten Sambas 78 188. Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Kabupaten Kabupaten Sintang 76 191. Kabupaten Sintang 61 192. Kabupaten Kapuas Hulu 196 | 186. | | • | |
| Barat Sambas 78 | 187. | Kalimantan | | 70 |
| Mempawah 39 I89. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Ketapang 76 191. Kabupaten Sintang 61 192. Kabupaten Kapuas Hulu 196 | | Barat | | /8 |
| 189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Ketapang 76 191. Kabupaten Sintang 61 192. Kabupaten Kapuas Hulu 196 | 188. | | Kabupaten | 20 |
| Sanggau Kabupaten Ketapang 191. Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu 196 | | | Mempawah | 39 |
| Sanggau Kabupaten Ketapang 191. Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu 196 | 189. | | Kabupaten | 60 |
| Ketapang 191. Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu 196 | | | Sanggau | 09 |
| 191. Ketapang Kabupaten Sintang 61 Kabupaten Kapuas Hulu 196 | 190. | | Kabupaten | 76 |
| 192. Kabupaten Kapuas 196 | | | | |
| Hulu | | | | 61 |
| Hulu | 192. | | | 196 |
| 1 102 Wohington | 4.5. | | | |
| 1 | 193. | | Kabupaten | 190 |
| Bengkayang | 104 | | | |
| Kabupaten Landak 55 | | | | 55 |
| Kabupaten 146 | 195. | | 1 | 146 |
| Sekadau | 100 | | | |
| Kabupaten Melawi 154 | | | • | 154 |
| Kabupaten Kayong 83 | 197. | | | 83 |
| Utara Vahanatan Vahan | 100 | | | |
| Kabupaten Kubu 85 | 198. | | | 85 |
| Raya | 100 | | | |
| Kota Pontianak 95 | | | | |
| 200. Kota Singkawang 33 | - | Volimont | | 33 |
| 201. Kalimantan Kabupaten 45 | 201. | | | 45 |
| Tengah Kotawaringin Barat | 200 | rengan | | 66 |
| 202. Kabupaten 66 | 202. | | napupaten | 1 00 |

| | 1 | T | 1 |
|------|------------|----------------------------------|-----|
| | | Kotawaringin | |
| | - | Timur | |
| 203. | | Kabupaten Kapuas | 262 |
| 204. | | Kabupaten Barito Selatan | 20 |
| 205. | - | Kabupaten Barito | |
| | | Utara | 19 |
| 206. | | Kabupaten | 25 |
| 207. | - | Katingan Kabupaten | |
| 207. | | Seruyan | 154 |
| 208. | | Kabupaten | 10 |
| 209. | | Sukamara | 10 |
| 209. | | Kabupaten Lamandau | 60 |
| 210. | | Kabupaten | 85 |
| 011 | - | Gunung Mas | 00 |
| 211. | | Kabupaten Pulang Pisau | 92 |
| 212. | | Kabupaten | 86 |
| 012 | - | Murung Raya | |
| 213. | | Kabupaten Barito Timur | 275 |
| 214. | | Kota Palangka | 42 |
| 215. | Kalimantan | Raya | |
| ∠13. | Selatan | Kabupaten Tanah Laut | 50 |
| 216. | | Kabupaten | 50 |
| 217. | - | Kotabaru Kabupaten Banjar | 429 |
| 217. | - | Kabupaten Barito | |
| | _ | Kuala | 227 |
| 219. | | Kabupaten Tapin | 28 |
| 220. | | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 34 |
| 221. | - | Kabupaten Hulu | 20 |
| | | Sungai Tengah | 39 |
| 222. | | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 34 |
| 223. | - | Kabupaten | 07 |
| | | Tabalong | 37 |
| 224. | | Kabupaten Tanah Bumbu | 58 |
| 225. | 1 | Kabupaten | |
| 440. | | Balangan | 96 |
| 226. | 1 | Kota Banjarmasin | 103 |
| 227. | 1 | Kota Banjarbaru | 40 |
| 228. | Kalimantan | Kabupaten Paser | 41 |
| 229. | Timur | Kabupaten Kutai | |
| |] | Kartanegara | 113 |
| 230. | _ | Kabupaten Berau | 34 |
| 231. | | Kabupaten Kutai Barat | 108 |
| 232. | 1 | Kabupaten Kutai | F-7 |
| | | Timur | 57 |
| 233. | | Kabupaten | 23 |
| | | Penajam Paser Utara | 23 |
| 234. | 1 | Kabupaten | 38 |
| 0.5- | | Mahakam Ulu | |
| 235. | _ | Kota Balikpapan | 92 |
| 236. | | Kota Samarinda | 124 |
| 237. | TZ 1' | Kota Bontang | 26 |
| 238. | Kalimantan | Kabupaten | 19 |
| | | | |

| 239. Kabupaten Malinau 64 | | Utara | Dulungon | |
|--|------|----------|------------------|------|
| Malinau S4 | 230 | Otara | Bulungan | |
| Rabupaten 30 Nunukan 30 Rabupaten Tana 4 Tidung 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 209. | | | 64 |
| Nunukan 30 | 240 | - | | |
| Example | 210. | | | 30 |
| Tidung | 241 | † | | |
| Sulawesi Kabupaten Bolaang Mongondow | | | | 4 |
| 243. Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow 183 244. Kabupaten Minahasa 49 245. Kabupaten Kabupaten Kepulauan 19 246. Kabupaten Kabupaten Minahasa Selatan 13 247. Kabupaten Minahasa Selatan 30 248. Kabupaten Minahasa Utara 29 249. Kabupaten Minahasa Utara 15 250. Kabupaten Minahasa Utara 15 250. Kabupaten Mongondow Utara 10 251. Kabupaten Kepulauan Siau Tenggara 10 252. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 11 253. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 49 254. Kota Manado Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 62 255. Kota Manado Kota Kotamobagu 62 257. Kota Mongondow Selatan 96 258. Sulawesi Tengah Kota Tomohon Kabupaten Donggala 56 259. Kabupaten Poso Kabupaten Poso Kabupaten Donggala 220 261. Kabupaten Buol Kabupaten Banggai Kepulauan 86 <t< td=""><td>242.</td><td>1</td><td></td><td>38</td></t<> | 242. | 1 | | 38 |
| Utara | | Sulawesi | | |
| Mongondow Kabupaten Kabupaten Kepulauan 19 Sangihe | | | | 183 |
| 244. Kabupaten Minahasa 49 Minahasa 245. Kabupaten Kepulauan Sangihe 19 Sangihe 246. Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan 30 Minahasa Selatan 247. Kabupaten Minahasa Utara 29 Minahasa Utara 248. Kabupaten Minahasa Utara 15 Minahasa Utara 249. Kabupaten Minahasa Utara 15 Minahasa M | | | | |
| Minahasa 49 | 244. | 1 | | 40 |
| Kepulauan 19 Sangihe Kabupaten Kabupaten Minahasa Selatan 29 Minahasa Selatan 29 Minahasa Utara 29 Minahasa 15 Minahasa 15 Minahasa 15 Minahasa 15 Minahasa 15 Minahasa 16 Minah | | | | 49 |
| Repulauan 19 Sangihe | 245. | | Kabupaten | |
| 244. Kabupaten | | | | 19 |
| Kepulauan Talaud | | | Sangihe | |
| Repulauan Talaud Minahasa Selatan 30 | 246. | | Kabupaten | 12 |
| Minaĥasa Selatan 30 | | | Kepulauan Talaud | 13 |
| Minahasa Selatan | 247. | | | 30 |
| Minaĥasa Utara Z9 | | | Minahasa Selatan | 30 |
| Minahasa Utara Kabupaten Minahasa 15 Tenggara Sabupaten Bolaang S9 Mongondow Utara Sabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Selatan Sela | 248. | | _ | 29 |
| Minaĥasa 15 Tenggara | | 1 | | 20 |
| Tenggara Kabupaten Bolaang 59 Mongondow Utara | 249. | | | |
| Kabupaten Bolaang S9 Mongondow Utara | | | | 15 |
| Bolaang Mongondow Utara | | _ | | |
| Mongondow Utara Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Mongondow Timur | 250. | | | 50 |
| Section | | | | 59 |
| Kepulauan Siau | 051 | _ | | |
| Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 251. | | _ | 10 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado 62 Kota Bitung 32 Kota Tomohon 16 Kota Kotamobagu 96 Kota Kotamobagu 96 Kabupaten Banggai 56 Banggai 56 Kabupaten Donggala 220 Kabupaten Donggala Kabupaten Donggala Kabupaten Morowali 18 Kabupaten Banggai 86 Kabupaten Banggai Moutong Moutong | | | | 10 |
| Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sela | 252 | + | | |
| Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 232. | | | 11 |
| Sample | | | | '' |
| Bolaang Mongondow Selatan | 253 | | | |
| Mongondow Selatan Se | 200. | | | |
| Selatan Kota Manado 62 | | | _ | 49 |
| Section | | | | |
| State | 254. | 1 | | 62 |
| Solawesi Sulawesi Tengah Sabupaten Sabupaten | 255. | 1 | | 32 |
| Kota Kotamobagu 96 | 256. | | | 16 |
| 258. Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai 56 259. Kabupaten Poso 193 260. Kabupaten Poso 193 261. Kabupaten Toli Toli 172 262. Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Buol 18 264. Kabupaten Banggai 86 Kepulauan 86 Kepulauan 265. Kabupaten Parigi Moutong 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut 56 Kabupaten Banggai Laut 56 Kabupaten Morowali Utara 19 | 257. | 1 | | 96 |
| Tengah Banggai So | 258. | Sulawesi | - | 50 |
| 260. Kabupaten Donggala 220 261. Kabupaten Toli Toli 172 262. Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Buol 18 264. Kabupaten Banggai 86 Kepulauan 86 Kabupaten Parigi Moutong 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut 56 269. Kabupaten Morowali Utara 19 | | Tengah | | 56 |
| 260. Kabupaten Donggala 220 261. Kabupaten Toli Toli 172 262. Kabupaten Buol 122 263. Kabupaten Buol 18 264. Kabupaten Banggai 86 Kepulauan 86 Kabupaten Parigi Moutong 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut 56 269. Kabupaten Morowali Utara 19 | 259. | | Kabupaten Poso | 193 |
| Donggala Z61. Kabupaten Toli Toli Z62. Kabupaten Buol Kabupaten Morowali Z64. Kabupaten Banggai Kepulauan Z65. Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Tojo Una-Una Xabupaten Sigi Xabupaten Xabupaten Banggai Laut Xabupaten Banggai Laut Xabupaten Morowali Utara | |] | | 220 |
| 262.Kabupaten Buol122263.Kabupaten Morowali18264.Kabupaten Banggai Kepulauan86265.Kabupaten Parigi Moutong366266.Kabupaten Tojo Una-Una112267.Kabupaten Sigi174268.Kabupaten Banggai Laut56269.Kabupaten Morowali Utara19 | |] | Donggala | |
| Kabupaten Morowali 264. Kabupaten Banggai Kepulauan 265. Kabupaten Parigi Moutong Moutong Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut 19 | |] | | |
| Morowali Kabupaten Banggai Repulauan 265. Kabupaten Parigi Moutong 366 Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut 19 | |] | Kabupaten Buol | 122 |
| 264. Kabupaten Banggai 86 Kepulauan 265. Kabupaten Parigi Moutong 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 268. Kabupaten Banggai Laut 56 Kabupaten Morowali Utara | 263. | | _ | 18 |
| Banggai 86 Kepulauan 265. Kabupaten Parigi 366 Moutong 266. Kabupaten Tojo 112 Una-Una 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten 56 Banggai Laut Kabupaten 19 | | | | 10 |
| Kepulauan Kabupaten Parigi Moutong Sabapaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Sabapaten Morowali Utara | 264. | | | |
| Kabupaten Parigi Moutong 266. Kabupaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara 366 56 | | | | 86 |
| Moutong Kabupaten Tojo Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi 174 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara | | _ | | |
| 266. Kabupaten Tojo Una-Una 267. Kabupaten Sigi 174 268. Kabupaten Banggai Laut 269. Kabupaten Morowali Utara 19 | 265. | | | 366 |
| Una-Una Una-Una 112 267. Kabupaten Sigi Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara | | _ | Ü | |
| 267. Kabupaten Sigi 174 268. Kabupaten Banggai Laut 269. Kabupaten 19 | 266. | | | 112 |
| 268. Kabupaten Banggai Laut 269. Kabupaten Morowali Utara 56 | 25- | - | | |
| Banggai Laut 269. Kabupaten Morowali Utara 19 | | 4 | | 174 |
| 269. Kabupaten 19 Morowali Utara | 268. | | | 56 |
| Morowali Utara | 060 | 4 | | |
| Morowali Utara | 269. | | _ | 19 |
| 210. Kota Palu 58 | 070 | - | | |
| | 270. | | kota Palu | J 58 |

| | 1 | 1 | 1 |
|------|----------|-------------------|-----|
| 271. | Sulawesi | Kabupaten | 20 |
| 070 | Selatan | Kepulauan Selayar | |
| 272. | | Kabupaten | 60 |
| 072 | | Bulukumba | |
| 273. | | Kabupaten | 136 |
| 074 | | Bantaeng | |
| 274. | | Kabupaten | 53 |
| 075 | | Jeneponto | 40 |
| 275. | | Kabupaten Takalar | 43 |
| 276. | | Kabupaten Gowa | 113 |
| 277. | | Kabupaten Sinjai | 35 |
| 278. | | Kabupaten Bone | 109 |
| 279. | | Kabupaten Maros | 51 |
| 280. | | Kabupaten | 40 |
| | | Pangkajene | 49 |
| 221 | | Kepulauan | |
| 281. | | Kabupaten Barru | 25 |
| 282. | | Kabupaten | 164 |
| | | Soppeng | |
| 283. | | Kabupaten Wajo | 291 |
| 284. | | Kabupaten | 44 |
| | | Sidenreng Rappang | |
| 285. | | Kabupaten Pinrang | 55 |
| 286. | | Kabupaten | 30 |
| | | Enrekang | |
| 287. | | Kabupaten Luwu | 53 |
| 288. | | Kabupaten Tana | 172 |
| | | Toraja | 172 |
| 289. | | Kabupaten Luwu | 46 |
| | | Utara | 40 |
| 290. | | Kabupaten Luwu | 44 |
| | | Timur | 77 |
| 291. | | Kabupaten Toraja | 34 |
| | | Utara | |
| 292. | | Kota Makassar | 225 |
| 293. | | Kota Pare Pare | 21 |
| 294. | | Kota Palopo | 27 |
| 295. | Sulawesi | Kabupaten Kolaka | 39 |
| 296. | Tenggara | Kabupaten Konawe | 36 |
| 297. | | Kabupaten Muna | 33 |
| 298. | | Kabupaten Buton | 15 |
| 299. |] | Kabupaten Konawe | 004 |
| | | Selatan | 231 |
| 300. | | Kabupaten | 404 |
| | | Bombana | 134 |
| 301. | | Kabupaten | 45 |
| | | Wakatobi | 15 |
| 302. | | Kabupaten Kolaka | 440 |
| | | Utara | 113 |
| 303. | | Kabupaten Konawe | 0 |
| | | Utara | 9 |
| 304. | | Kabupaten Buton | 0 |
| | | Utara | 9 |
| 305. |] | Kabupaten Kolaka | 400 |
| | | Timur | 102 |
| 306. | 1 | Kabupaten Konawe | _ |
| | | Kepulauan | 5 |
| 307. | 1 | Kabupaten Muna | 40 |
| | | Barat | 12 |
| 308. | 1 | Kabupaten Buton | |
| | | Tengah | 13 |
| 309. | 1 | Kabupaten Buton | 4.4 |
| | | Selatan | 11 |
| 310. | 1 | Kota Kendari | 59 |
| | i | | |

| 311. | | Kota Baubau | 25 |
|-------------|-----------|-------------------------------|-----|
| 311. | Gorontalo | Kabupaten | |
| 014. | dorontalo | Gorontalo | 54 |
| 313. | - | Kabupaten | |
| | | Boalemo | 122 |
| 314. | - | Kabupaten Bone | 00 |
| | | Bolango | 23 |
| 315. | | Kabupaten | 118 |
| | | Pohuwato | 110 |
| 316. | | Kabupaten | 80 |
| | | Gorontalo Utara | |
| 317. | | Kota Gorontalo | 32 |
| 318. | Sulawesi | Kabupaten | 26 |
| 010 | Barat | Pasangkayu | - |
| 319. | | Kabupaten | 44 |
| 200 | | Mamuju | |
| 320. | | Kabupaten Mamasa | 117 |
| 321. | 1 | Kabupaten | |
| 041. | | Polewali Mandar | 318 |
| 322. | - | Kabupaten Majene | 25 |
| 323. | 1 | Kabupaten Majene Kabupaten | |
| 020. | | Mamuju Tengah | 20 |
| 324. | Maluku | Kabupaten Maluku | 5.4 |
| | | Tengah | 54 |
| 325. | | Kabupaten Maluku | 40 |
| | | Tenggara | 16 |
| 326. | | Kabupaten | |
| | | Kepulauan | 14 |
| | | Tanimbar | |
| 327. | | Kabupaten Buru | 21 |
| 328. | | Kabupaten Seram | 16 |
| 220 | | Bagian Timur | - |
| 329. | | Kabupaten Seram | 25 |
| 330. | | Bagian Barat | |
| 330. | | Kabupaten Kepulauan Aru | 14 |
| 331. | | Kabupaten Maluku | |
| 551. | | Barat Daya | 11 |
| 332. | | Kabupaten Buru | _ |
| 004. | | Selatan | 9 |
| 333. | | Kota Ambon | 69 |
| 334. | | Kota Tual | 11 |
| 335. | Maluku | Kabupaten | 17 |
| | Utara | Halmahera Barat | 17 |
| 336. | | Kabupaten | 8 |
| | _ | Halmahera Tengah | |
| 337. | | Kabupaten | 28 |
| 220 | 1 | Halmahera Utara | |
| 338. | | Kabupaten | 34 |
| 339. | - | Halmahera Selatan | |
| JJ9. | | Kabupaten Kepulauan Sula | 15 |
| 340. | - | Kabupaten | |
| 0 10. | | Halmahera Timur | 14 |
| 341. | 1 | Kabupaten Pulau | 10 |
| | | Morotai | 10 |
| 342. | 1 | Kabupaten Pulau | |
| • | | Taliabu | 8 |
| 343. | | Kota Ternate | 35 |
| 344. | | Kota Tidore | 15 |
| | | Kepulauan | 15 |
| 345. | Papua | Kabupaten | 34 |
| | | Merauke | 0-1 |
| | | | |

| 346. | | Kabupaten | 151 |
|------|-------|------------------------|-----|
| | | Jayawijaya | 101 |
| 347. | | Kabupaten | 18 |
| | | Jayapura | 10 |
| 348. | | Kabupaten Nabire | 21 |
| 349. | | Kabupaten | |
| 0.51 | | Kepulauan Yapen | 14 |
| 350. | | Kabupaten Biak | |
| 330. | | Numfor | 22 |
| 351. | | | |
| 351. | | Kabupaten Puncak | 94 |
| 050 | | Jaya | 400 |
| 352. | | Kabupaten Paniai | 123 |
| 353. | | Kabupaten Mimika | 32 |
| 354. | | Kabupaten Sarmi | 6 |
| 355. | | Kabupaten Keerom | 8 |
| 356. | | Kabupaten | |
| | | Pegunungan | 11 |
| | | Bintang | |
| 357. | | Kabupaten | |
| 007. | | Yahukimo | 142 |
| 358. | | Kabupaten | |
| 336. | | | 108 |
| 250 | | Tolikara | |
| 359. | | Kabupaten | 5 |
| | | Waropen | - |
| 360. | | Kabupaten Boven | 10 |
| | | Digoel | 10 |
| 361. | | Kabupaten Mappi | 74 |
| 362. | | Kabupaten Asmat | 15 |
| 363. | | Kabupaten Supiori | 3 |
| 364. | | Kabupaten | |
| 00., | | Mamberamo Raya | 18 |
| 365. | | Kabupaten | |
| 303. | | Mamberamo | 39 |
| | | | 39 |
| 266 | | Tengah | 40 |
| 366. | | Kabupaten Yalimo | 10 |
| 367. | | Kabupaten Lanny | 145 |
| | | Jaya | |
| 368. | | Kabupaten Nduga | 82 |
| 369. | | Kabupaten Puncak | 82 |
| 370. | | Kabupaten Dogiyai | 71 |
| 371. | | Kabupaten Intan | 0.7 |
| | | Jaya | 37 |
| 372. | | Kabupaten Deiyai | 55 |
| 373. | | Kota Jayapura | 44 |
| 374. | Papua | Kabupaten Sorong | 14 |
| 375. | Barat | | 17 |
| 513. | Darai | Kabupaten Manokwari | 25 |
| 076 | | | |
| 376. | | Kabupaten Fak | 12 |
| | | Fak | ·- |
| 377. | | Kabupaten Sorong | 7 |
| | | Selatan | ' |
| 378. | | Kabupaten Raja | 7 |
| | | Ampat | , |
| 379. | | Kabupaten Teluk | 40 |
| | | Bintuni | 10 |
| 380. | | Kabupaten Teluk | _ |
| | | Wondama | 5 |
| 381. | | Kabupaten | |
| 551. | | Kaimana | 10 |
| 382. | - | | |
| JOZ. | | Kabupaten | 2 |
| 202 | | Tambrauw | |
| 383. | | Kabupaten | 6 |
| | | Maybrat | |
| 384. | | Kabupaten | 4 |
| JO4. | | Kabupaten | 4 |

| | Manokwari Selatan | |
|------|-------------------------------|----|
| 385. | Kabupaten Pegunungan Arfak | 25 |
| 386. | Kota Sorong | 40 |

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina, karantina. Pada hari ke-5 dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KEDUABELAS

- Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
 - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

- 2) tata rasionalisasi dan/atau realokasi cara kebutuhan tambahan pendanaan untuk penyaluran dan bantuan penganggaran sosial/jaring pengamanan sosial dalam **PPKM** mendukung pelaksanaan berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu. Perubahan Alokasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data **KPM** oleh pemerintah Daerah, perekaman Data **KPM** penerima BLT-DD pada Om-SPAN ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KETIGABELAS

- Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
 - a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada

- pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

- KEEMPATBELAS: a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMABELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

> > ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 3.

- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet:
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

R. Gani Muhamad, S.H. MAP.
Pembina Utama Muda MV.
NIP. 19690818 199603 10011